

**IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI DESA
KARANGPANDAN KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN
KARANGNYAR**

**IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ALLOCATION PROGRAM IN
KARANGPANDAN VILLAGE, KARANGPANDAN DISTRICT,
KARANGANYAR REGENCY**

**Pramesti larasati¹, Dr. Joko Pramono, S. Sos., M. Si², Dra. Sri Riris Sugiyarti, M.
Si³**

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Pramestilarasati01@gmail.com, masjepe69@gmail.com, ririss68@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program alokasi dana desa di desa Karangpandan kecamatan Karangpandan kabupaten Karanganyar. Agar alokasi dana desa di desa Karangpandan dapat terlaksana dengan baik. Sumber daya manusianya dibutuhkan orang-orang yang berkualitas dalam bidang administrasi, manajemen dan IT untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (dalam Isra 2020:17) implementasi merupakan segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dimana menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menggunakan dua jenis data yakni data primer dan sekunder, teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian teknik analisis data menggunakan Model Miles and Huberman (2014) yaitu pengumpulan data, penyajian data, kondensasi, penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas data menggunakan triangulasi yaitu triangulasi waktu, sumber dan teknik. Hasil penelitian melalui analisis implementasi dengan empat variabel yaitu 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi, 4) struktur birokrasi menjelaskan bahwa implementasi program alokasi dana desa di desa Karangpandan kecamatan Karangpandan kabupaten Karanganyar sudah berjalan dengan baik namun perlu dioptimalkan.

Implementasi program alokasi dana desa di desa Karangpandan sudah baik namun perlu dioptimalkan. Sesuai dengan variabel komunikasi terkait dengan kejelasan informasi dan sumber daya terkait dengan kuantitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk tercapainya tujuan implementasi yang baik. Sehingga perlu dioptimalkan dengan cara peningkatan intensitas sosialisasi, motivasi, dan koordinasi antara pemerintah desa dengan lembaga terkait dan masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe and analyze the implementation of the village fund allocation program in Karangpandan village, Karangpandan district, Karanganyar regency. So that the allocation of village funds in Karangpandan village can be carried out properly. Its human resources require qualified people in the fields of administration, management and IT to carry out government functions. Policy implementation according to George C. Edwards III (in Isra 2020:17) implementation is all actions taken by the government to achieve a goal set in a policy decision.

Based on this, the authors use a qualitative research method which uses data collection techniques by interviews, observation, and documentation. Using two types of data, namely primary and secondary data, the informant determination technique uses a purposive sampling technique. Then the data analysis technique uses the Miles and Huberman Model (2014), namely data collection, data presentation, condensation, drawing conclusions. To ensure the validity of the data using triangulation, namely triangulation of time, sources and techniques. The results of the study through implementation analysis with four variables, namely 1) communication, 2) resources, 3) disposition, 4) bureaucratic structure explained that the implementation of the village fund allocation program in Karangpandan village, Karangpandan district, Karanganyar regency has been going well but needs to be optimized.

The implementation of the village fund allocation program in Karangpandan village is good but needs to be optimized. In accordance with the communication variables related to the clarity of information and resources related to the quantity of human resources needs to be improved to achieve good implementation goals. So it needs to be optimized by increasing the intensity of outreach, motivation, and coordination between the village government and related institutions and the community.

Keywords: Policy Implementation, Allocation of Village Funds

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah membuat kebijakan penyaluran alokasi dana desa sebagai jawaban atas upaya puluhan tahun yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah desa. Pemerintah desa dan masyarakat adat selama ini merasa terpinggirkan dan diabaikan oleh negara dalam hal pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur. Terlihat dari tingkat pembangunan desa dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Ini membuktikan

bahwa desa menjadi garda terdepan dalam pembangunan suatu negara secara nasional.

Alokasi dana desa adalah sumber daya APBN yang dialokasikan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan disalurkan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk membiayai kebutuhan desa terkait dengan kebutuhan desa. penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. alokasi dana desa adalah bagian keuangan

desa dari kecamatan yang disalurkan melalui kas desa. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana yang diterima pemerintah dari perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alokasi dana desa memiliki tujuan Meningkatkan dan memperbaiki perekonomian masyarakat pedesaan dari masalah kemiskinan agar daya saing desa mereka meningkat dapat dilakukan melalui empat langkah. Pertama, menciptakan produk unggulan daerah desa (Prukades). Kedua, menggali potensi pendapatan asli desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketiga, membangun gudang desa untuk pertanian produktif dan sumber air desa. Terakhir, membangun pusat kebugaran desa untuk meningkatkan kesehatan dan semangat masyarakat pedesaan.

Alokasi dana desa yang di berikan pemerinta pusat ke daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini membuktikan bahwa pemerintah mendukung penuh adanya program alokasi dana desa tersebut. Sehingga dalam pengimplemetasinya harus benar benar berjalan dengan baik. Dalam mengimplementasikan Alokasi dana desa tentunya tidak luput dari masalah masalah yang terjadi. Menurut Indonesia Corruption Watch secara nasional kasus korupsi yang menduduki peringkat satu terjadi pada pemerintah desa. Ini membuktikan bahwa dalam menjalankan tanggung jawabnya masih mengalami banyak kendala. Apabila hal ini terjadi secara terus

menerus tentunya akan berdampak pada alokasi dana desa.

Menurut Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 142/967 tahun 2021 tentang penetapan alokasi dana desa tahun 2022 Desa Karangpandan merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan karangpandan kabupaten karanganyar yang mendapatkan alokasi dana desa. Berdasarkan data kepegawaian di kantor desa Karangpandan kecamatan Karangpandan menunjukkan bahwa rata rata tingkat pendidikan perangkat desa lebih banyak lulusan SMA sebanyak 8 sedangkan untuk lulusan sajanan 5 dan ahli madya 2. Dan rata rata umur perangkat desa adalah 41 tahun. Melihat perkembangan zaman di era digitalisasi keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan yang dihadapi dalam mengelola dan menentukan program pembangunan serta pengelolaan anggaran desa. Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa menghasilkan kebergantungan pada satu atau dua individu Perangkat Desa yang memiliki keahlian dalam IT. Untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang ada, diperlukan orang-orang yang berkualitas dalam bidang administrasi, manajemen, dan IT.

Dari penjabaran yang telah diuraikan di latar belakang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan **“Implementasi Program**

Alokasi Dana Desa Di Kelurahan Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar"

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program alokasi dana desa di desa Karangpandan kecamatan Karangpandan kabupaten Karanganyar.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Menurut Wilson (dalam Wahab 2016:13) secara luas kebijakan publik adalah tindakan, strategi, target dan pernyataan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang spesifik.

Menurut James E. Anderson (dalam wahab 2016:8) Kebijakan publik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah sesuai dengan aturan-aturan tertentu untuk menyelesaikan masalah dalam mencapai tujuan dan sasaran khusus.

Menurut Thomas R Dye (dalam Suaib 2016:72) Kebijakan publik merujuk pada keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Tindakan yang diambil oleh pemerintah memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik lebih menekankan pada peran pemerintah atau negara.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan public adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukukan pemerintah untuk kepentingan masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan public tidak lepas dari pembentukan kebijakan public sehingga mencapai tujuan kebijakan public itu sendiri.

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan adalah sebuah analisis kebijakan publik yang ditujukan untuk proses pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan adalah proses yang sangat rumit dan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik karena adanya campur tangan pelaku politik. Pelaksanaan berasal dari kata bahasa Inggris "to implement" yang berarti menerapkan. implementasi adalah penyediaan untuk melaksanakan sesuatu yang berdampak atau memiliki konsekuensi terhadap sesuatu, biasanya dilakukan untuk menghasilkan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implementasi kebijakan memiliki dua model pendekatan, yakni model top-down dan bottom-up. Pendekatan top-down dipakai oleh para peneliti yang menggunakan pemetaan logika berfikir dari atas ke bawah untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Sedangkan menurut Nugroho

(dalam Hertati 2020:5) Model top-down adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memandu rakyat, di mana partisipasinya lebih berupa penggerakan.

Menurut Van Mater dan Van Horn (dalam Pangerapan 2018:10) Mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah Sebuah kegiatan yang sedang berlangsung yang melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta, dan kelompok sosial dengan tujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dimana dalam teori ini tidak hanya pemerintah yang menjadi pelaku dalam mengimplementasikan suatu kebijakan namun juga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran implementasi tersebut.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab 2016:135) menjelaskan bahwa Kesuksesan implementasi kebijakan tergantung pada pemahaman mengenai dampak yang sebenarnya terjadi setelah program tersebut dijalankan. Fokus utama pelaksanaan adalah aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Menurut George C. Edwards III (dalam Isra 2020:17) implementasi adalah Segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan harus dievaluasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut dapat

menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat atau tidak.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau individu yang berwenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan efek pada target yang dituju.

C. Program Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD merupakan Bagian keuangan desa didapat dari pembagian hasil pajak lokal dan sebagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 13 bahwa Alokasi Dana Desa adalah sebuah kumpulan dan pengalihan dana yang berasal dari anggaran keuangan daerah, yaitu APBD Kabupaten/Kota, yang diperoleh melalui Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diberikan kepada Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan Desa.

Menurut peraturan Bupati Karanganyar nomor 19 tahun 2021 alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Bagian pendanaan yang diterima wilayah dalam APBD setelah dipotong DAK.

Berdasarkan teori Edward III tentang bagaimana implementasi dapat di ukur (dalam Syahrudin 2018:59-64). Maka variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Komunikasi**
komunikasi yang efektif sangat penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini karena interaksi tersebut memungkinkan para pelaksana untuk memahami tugas dan tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III (dalam syahrudin 2019:59) memiliki beberapa dimensi meliputi transmisi (transmission), kejelasan (clarity), konsistensi (consistency)
2. **Sumber Daya**
Sumber daya memiliki peranan yang amat krusial untuk menunjang keberhasilan suatu program. Beberapa faktor harus dipenuhi agar sumberdaya dapat beroperasi dengan optimal, seperti tenaga kerja (SDM), data, dan sarana.
3. **Disposisi**
Untuk menjalankan kebijakan yang efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya perlu memahami tindakan yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki keterampilan untuk melakukannya dengan baik. Hal ini dapat disebut sebagai disposisi. Dimensi yang mempengaruhi disposisi antara lain sikap pelaksana dan dukungan dari pemimpin.
4. **Struktur Birokrasi**
Struktur elemen (elemen-elemen) tugas di dalam perusahaan yang menunjukkan terjadinya pengelompokan pekerjaan. Dalam implementasi kebijakan perlu adanya kerjasama. Sehingga apabila dalam birokrasi tidak kondusif

maka terhambatnya jalan kebijakan. Dimensi dalam struktur birokrasi antara lain adalah mekanisme dan fragmentasi (penyebara tanggung jawab).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam mencapai kesuksesan sebuah penelitian. Karena keberhasilan riset bergantung pada ketepatan metodologi yang diterapkan. Metodologi riset adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat yang jelas. Data yang dihasilkan dalam riset itu bersifat empiris dan harus memenuhi kriteria validitas.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:8) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian didasarkan pada filsafat postpositivisme atau interpretif untuk mengamati objek alamiah. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam mendapatkan data yang mendalam. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kombinasi teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh cenderung bersifat kualitatif, dan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berorientasi pada pemahaman, konstruksi fenomena, penemuan keunikan, dan pengembangan hipotesis.

Metode penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalis

dilakukan pada kondisi yang alami dan pada objek yang juga alami. Objek yang alami di sini berarti objek yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, tidak dimanipulasi, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika objek tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini digunakan sebagai tempat mendapatkan sumber data dari beberapa informan, peneliti memilih melakukan penelitian ini dalam kurun waktu selama 2 bulan di Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Karena pada proses implementasi program alokasi dana desa terdapat kendala pada keterbatasan sumber daya manusia yang belum optimal sehingga cukup menarik untuk dikaji dan diteliti.

C. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2018:225) Sumber data primer ialah data yang diterima secara langsung oleh pengumpul, sedangkan sumber data sekunder ialah data yang tidak diterima secara langsung oleh pengumpul data.

Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Data primer diambil dengan Informasi awal diperoleh melalui proses wawancara dengan staf kantor Desa Karangpandan dan penduduk sekitar mengenai pelaksanaan program alokasi dana desa. Data Sekunder, yaitu yang

tidak dihasilkan langsung oleh peneliti sendiri. Dokumen tersebut dapat berupa buku, jurnal, atau penelitian sebelumnya. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen tersebut. seperti data realisasi anggaran pada Desa Karangpandan.

Jenis data di bedakan menjadi dua yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif berbentuk angka sedangkan data kualitatif berbentuk deskripsi. Data kualitatif penelitian ini berupa hasil wawancara yang berbentuk deskripsi yang telah di tanyakan kepada narasumber.

D. Penentuan Informan

Menurut sugiyono (2018:219) teknik pengambilan sampel adalah Metode yang diterapkan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Purposive sampling merupakan salah satu teknik yang dapat dipakai, dimana teknik ini memperhitungkan faktor-faktor spesifik dalam menentukan sumber data yang akan diambil..

Di mana pertimbangan tersebut adalah bahwa informan tersebut telah lama terlibat dalam kegiatan atau aktivitas yang menjadi fokus penelitian, masih aktif secara penuh dalam lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti, dan memiliki banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai. Informan yang dipilih oleh peneliti Kepala Desa Karangpandan, Aparatur desa (2 orang) yaitu staf TU & umum dan Kaur Perencanaan, Masyarakat (2 Orang) yaitu 1 Tokoh masyarakat dan 1

Tokoh Pemuda yang terlibat langsung dalam kegiatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono (2018:225) teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Wawancara Metode ini diterapkan dengan menggunakan panduan wawancara, sehingga pertanyaan yang diajukan lebih terstruktur dan terarah. Teknik wawancara dipilih sebagai alat penelitian karena lebih dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas, karena informan memberikan penjelasan tambahan saat menjawab pertanyaan. Selama periode penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam program kegiatan ini. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (terlampir) sebagai instrumen.

Dokumentasi Metode pencatatan dipakai untuk menghimpun informasi dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya yang dihasilkan oleh individu. Alasan peneliti menggunakan teknik ini adalah untuk memperoleh data sampel dengan cepat dan efektif. Teknik pencatatan ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi penting. Sebab, hasil penelitian dari pengamatan dan wawancara akan lebih valid jika didukung oleh informasi sejarah dan juga dokumentasi visual seperti foto atau karya ilmiah yang telah ada.

Observasi data merupakan penjabaran yang akurat, teliti dan

terperinci tentang data situasi lapangan, aktivitas petugas dan kondisi sosial serta konteks di mana aktivitas-aktivitas tersebut terjadi. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati langsung sesuatu yang terkait dengan masalah penelitian yang dianggap sulit untuk dinyatakan dalam semua kegiatan seperti peran pemerintah Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan terhadap Implementasi Program Alokasi Dana Desa.

F. Uji Validitas Data

Uji validitas data ini dapat digunakan sebagai bukti bahwa data yang didapat oleh peneliti adalah data yang sesuai dengan kenyataan dan dapat dipercaya. Uji validitas data ini adalah suatu Langkah untuk mengurangi kesalahan dalam memperoleh data di lapangan.

Menurut sugiyono (dalam Diana 2021:45), teknik yang digunakan dalam uji validitas data adalah triangulasi. Triangulasi adalah Metode verifikasi data teknis memanfaatkan elemen lain di luar data itu sendiri untuk tujuan pengecekan dan perbandingan data. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan sumber, waktu, cara, dan faktor lainnya.

Triangulasi yang digunakan adalah Triangulasi Sumber menurut sugiyono (2018:274) Triangulasi sumber untuk memverifikasi informasi yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber yang berbeda. Dengan demikian, kita dapat memperoleh validasi dari berbagai sumber.

G. Teknik Analisis Data

Penganalisisan data adalah proses mencari dan mengatur data secara teratur, yang sebelumnya diperoleh dari berbagai metode seperti, tanya jawab, survei, pengamatan, dan pencatatan. Aktivitas analisis data Model Miles and Huberman (2014), yaitu:

Pengumpulan data adalah Aktivitas menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Pada penelitian ini, informasi yang diperoleh dari lapangan cukup melimpah, sehingga perlu dicatat secara cermat dan terperinci. Semakin banyak informasi yang terkumpul, maka akan semakin kompleks dan rumit. Setelah memperoleh informasi yang cukup, peneliti perlu melakukan analisis data melalui pengkondensasian data.

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang mendekati keseluruhan bagian-dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, materi-materi empiris lainnya. Dalam penelitian ini melalui analisis kondensasi data kita dapat melakukan kategorisasi, merangkum sehingga peneliti dapat mengambil data yang penting. Sehingga data tersebut dapat di susun dalam penyajian data.

Setelah melalui Kondensasi data maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam tahap ini, sekumpulan data disusun secara sistematis supaya mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan

kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat disajikan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja yang selanjutnya.

Pada tahap kesimpulan, ini adalah tahap terakhir dalam teknik analisis data. Pada tahap ini disajikan dalam rangkuman yang singkat dan jelas. Kesimpulan yang awalnya sementara akan berubah bila tidak di temukan bukti bukti yang kuat dan mendukung. Tetapi bila ditemukan bukti bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang ada atau mungkin tidak. Karena kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Agar dapat mengetahui kesuksesan pelaksanaan program pengalokasian dana desa, peneliti menggunakan beberapa variabel yang terkait satu sama lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variable untuk mengukur implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Syahrudin 2019:59-64). Menurut Edward III ada empat variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Variabel komunikasi ini untuk mengkaji penyaluran informasi atau

transmisi, kejelasan informasi dan konsistensi pada implementasi program alokasi dana desa yang berada di desa Karangpandan. Untuk mengetahui faktor faktor tersebut dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yang hasilnya :

Pada faktor transmisi penyaluran informasi melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran informasi pada implementasi program alokasi dana desa di desa Karangpandan yaitu melalui sosialisasi yang berupa musbangdes pertahunnya yang dihadiri oleh beberapa perwakilan tokoh masyarakat dan pemuda. Selain dari sosialisasi musbangdes masyarakat juga mengetahui informasi tersebut melalui rapat pembangunan dusun. Sedangkan tidak langsung melalui digital yaitu grup WhatsApp pada masing masing dusun.

Dari faktor kejelasan informasi apa yang disampaikan oleh pemerintah desa pada saat sosialisasi musbangdes cukup jelas. Meskipun intensitas yang digunakan pada saat sosialisasi hanya satu tahun sekali dan masyarakat mendapat informasi tidak secara langsung namun dilihat dari masyarakat sebelum melakukan pembangunan mereka mengajukan dana dari program alokasi dana desa kepada pemerintah desa pada saat rapat dusun ini membuktikan bahwa informasi yang diberikan oleh pemerintah desa sudah cukup jelas dan sampai kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut untuk membangun dusunya masing masing.

Dari faktor konsistensi didapat bahwa informasi yang diberikan sudah konsisten. Rencana

pembangunan dengan implementasi pembangunan di desa Karangpandan sudah sesuai dengan regulasi. Hal ini di buktikan dengan pernyataan beberapa informan yang menyatakan bahwa prioritas program kegiatan pembangunan yang didanai oleh dana desa sudah sesuai dengan peraturan bupati yaitu perbup kabupaten Karanganyar No. 19 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan dana transfer kepada desa. Selain itu informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan program yang akan dilakukan oleh masyarakat.

Dari penjabaran faktor faktor terkait dengan variabel komunikasi dalam implementasi program alokasi dana desa di desa Karangpandan diatas, dapat diketahui bahwa komunikasi pada implementasi program tersebut dilihat dari transmisi, konsistensi informasi dan kejelasan informasi sudah terlaksana dengan baik

2. Sumber Daya

Variabel sumber daya ini untuk mengkaji sumber daya manusia, fasilitas, anggaran. Untuk mengkaji faktor faktor tersebut dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yang hasilnya:

Dari faktor sumber daya manusia pada implementasi program alokasi dana desa di desa Karangpandan yaitu melalui partisipasi gotong royong yang melibatkan masyarakat desa Karangpandan. Partisipasi gotong royong agar dapat berjalan harus dilakukan di hari libur agar tidak mengganggu pekerjaan masyarakat. Sehingga implementasi program kegiatan pembangunan yang didanai oleh dana desa tetap berjalan. Namun meskipun pembanguna

infrastruktur seperti pengaspalan jalan, pembuatan talud dan lain lain tetap berjalan tetapi kurang berjalan dengan maksimal. Karena apabila hanya dilakukan pada hari kerja, pembangunan infrastruktur akan selesai dalam jangka waktu lama.

Dari faktor fasilitas berkaitan dengan sarana dan prasarana yang digunakan pada implementasi program alokasi dana desa di desa Karangpandan. Pada implementasinya sarana dan prasarana yang digunakan sudah memadai. Rata rata setiap dusun sudah memiliki fasilitas yang digunakan pada pembangunan sebagai aset dusun. Seperti ruang aula, meja, kursi sebagai fasilitas penunjang sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat. Lalu beberapa alat ringan untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur (pengaspalan jalan, pembuatan talud dan sebagainya). Sehingga apabila sarana dan prasarana terdapat kekurangan maka masyarakat menganggarkan beberapa dana untuk menyewa beberapa fasilitas lainnya. Seperti untuk pembangunan infrastruktur sendiri masyarakat menganggarkan untuk menyewa alat berat seperti mesin pengaspal, molen beton dan sebagainya yang dibutuhkan. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu dengan menyewa pembicara/narasumber, pelatih, dan sebagainya pada pelatihan dan sosialisasi.

Dari faktor anggaran berkaitan dengan sumber anggaran dana yang digunakan. Pada implementasi program alokasi dana desa anggaran bersumber dari bantuan keuangan dari provinsi, dan bantuan keuangan dari DPRD (dana aspirasi DPRD). Seluruh anggaran yang di

alokasikan untuk pembangunan pada program ini sudah memadai sehingga dapat menunjang implementasi Program alokasi dana desa di desa Karangpandan.

Dari penjabaran faktor faktor terkait variabel sumber daya yang ada didalam program alokasi dana desa diketahui bahwa fasilitas yaitu sarana dan prasarana yang digunakan sudah baik dan memadai. Sehingga implementasi dapat berjalan. Tetapi pada faktor sumber daya manusia belum cukup memadai karena pembangunan hanya dapat di kerjakan ketika hari libur sehingga menghambat penyelesaian.

3. Disposisi

Variable disposisi ini untuk mengkaji sikap pelaksana dan dukungan pemimpin. Untuk mengkaji faktor faktor tersebut dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yang hasilnya :

Pada faktor sikap pelaksana pada implementasi program alokasi dana desa untuk mengetahui sikap pelaksana pada pelaksanaan program tersebut dan melihat respon lembaga desa terhadap program kegiatan tersebut. Lembaga desa mendukung penuh adanya program alokasi dana desa di desa Karangpandan. Seperti lembaga desa yang terkait yaitu BPD (badan permusyawaratan desa), karang taruna, KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) dan lainya ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program alokasi dana desa di desa Karangpandan. Sedangkan respon yang di berikan masyarakat terkait program ini tentunya masyarakat mendukung dan antusias karena dengan adanya program alokasi dana desa ini masyarakat memiliki

kesempatan untuk membangun desa sendiri mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakatnya. Terbukti dari setiap dusun mempunyai kegiatan pembangunan masing masing untuk memanfaatkan program alokasi dana desa ini.

Selanjutnya dari faktor dukungan pemimpin. Pemerintah desa tentunya mendukung penuh adanya program kegiatan ini dilihat dari pemerintah desa ang ikut terjun langsung dan mendampingi program pembaguan yang didanai oleh program aloaksi dan desa. Tidak hanya dari pemerintah desa namun pemerintah pusatpun mendukung penuh adanya program alokasi dana desa ini. Terbukti dari dana desa yang di dapat oleh pemerintah Desa Karangpandan Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan dari pada tahun kemarin.

Dari penjabaran faktor faktor terkait variabel disposisi yang ada di dalam program alokasi dana desa diketahui bahwa faktor sikap pelaksana dan dukungan pemimpin sangat baik sehingga implementasi program alokasi dana desa di desa karangpandan dapat berjalan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Variable struktur birokrasi ini untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan program dan fragmentasi birokrasi. Untuk mengkaji faktor faktor tersebut dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yang hasilnya :

Dari faktor mekanisme pelaksanaan terdapat juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan). Selain itu dalam pengajuan pencairan dana desa terdapat mekanismenya. Penyaluran

dana desa sendiri ada 3 tahap dalam satu tahun yaitu tahap 1 sebesar 20%, tahap 2 sebesar 40%, dan tahap 3 sebesar 40%. Sedangkan untuk Prosedur pencairan dana desa yaitu Pertama-tama, bendahara desa mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran) yang dilampiri RKD (rencana kebutuhan desa) dan bukti pengeluaran dana. Selanjutnya, sekretaris desa melakukan verifikasi dan menerbitkan SPM (surat perintah membayar). Setelah itu, bendahara desa menerima SPM dan surat rekomendasi camat untuk mencairkan dana kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk. Terakhir, dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dicatat ke dalam BKU (buku kas umum) dan diserahkan kepada pimpinan kegiatan. Selain itu dalam pelaksanaannya pemerintah desa turut mendampingi program pembangunan tersebut. Setiap lembaga yang ikut berpartisipasi dan masyarakat yang memiliki tanggungjawab menjalankan tugasnya sesuai dengan kesepakatan musyawarah.

Selanjutnya untuk faktor frakmentasi birokrasi sendiri berkaitan dengan pembagian wewenang serta tanggung jawab dan peran pemerintah desa pada program alokasi dana desa. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pada proses pelaksanaan program alokasi dana desa yaitu melalui musyawarah yang diadakan oleh masyarakat pada tiap dusun untuk membagi tugas tugasnya. Selain itu tentunya dalam musyawarah pembagian wewenang dan tanggung jawab tersebut didampingi oleh perwakilan dari pemerintah desa. Sedangkan peran dari pemerintah desa sendiri dalam program alokasi dana desa pemerintah desa sebagai

penanggung jawab program kegiatan ini dan pelaksana. Pemerintah desa berperan aktif berpartisipasi terjun langsung dalam program kegiatan ini. Selain itu Koordinasi antara pemerintah desa dengan lembaga lembaga terkait seperti KIM, Karangtaruna dan sebagainya serta masyarakat yang memiliki tugas dan tanggungjawab berjalan dengan baik.

Dari penjabaran faktor faktor terkait variabel struktur birokrasi yang ada di dalam program alokasi dana desa diketahui bahwa faktor mekanisme dan fragmentasi birokrasi sudah berjalan dengan baik. Sehingga program alokasi dana desa di desa Karangpandan dapat berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian implementasi program alokasi dana desa di Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar berjalan dengan baik meskipun terdapat kendala di beberapa indikator. Sehingga dapat disimpulkan pada setiap variabelnya sebagai berikut :

1. Komunikasi yang digunakan pada implementasi program alokasi dana desa di desa Karangpandan belum berjalan secara maksimal. Dapat dilihat melalui tiga faktor yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan informasi secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik.
2. Sumber daya yang ada di dalam implementasi program alokasi dana desa di desa Karangpandan belum sepenuhnya maksimal. Terutama pada kuantitas sumber daya manusianya yaitu partisipasi masyarakat melalui gotong royong

hanya bisa dilakukan pada saat hari libur agar tidak mengganggu pekerjaan masyarakat Sedangkan untuk indikator fasilitas dan sumber anggaran sudah cukup baik dan memadai.

3. Disposisi yang ada pada implementasi program alokasi dana desa di desa Karangpandan sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari sikap pelaksana, pemerintah dan lembaga terkait atas kegiatan program pembangunan yang didanai oleh dana desa didukung penuh oleh masyarakat pemerintah dan juga lembaga terkait.
4. Struktur birokrasi yang ada pada implementasi program alokasi dana desa di desa Karangpandan dapat berjalan dengan baik melihat mekanisme, peran pemerintah desa dan juga pembagian wewenang dan tanggung jawab dapat berjalan dan melibatkan masyarakat juga pemerintah desa dalam kegiatan program pembangunan yang didanai oleh dana desa.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar" penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

Pada Kuantitas sumber daya manusia, kegiatan pembangunan infrastruktur program alokasi dana desa ini dapat di ganti malam hari agar masyarakat dapat berpartisipasi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik : Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018

Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik :Praktik Analisis Kebijakan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018

Purwanto, Jarot Hidayat & Yudis Jakaria, *Pemimpin & Implementasi Kebijakan Publik*, Alqaprint, Jatinagor, 2019.

Suaib, Muhammad Ridha, *PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK : Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan publik, Good Governance Hingga Impementasi Kebijakan*, CALPULIS, Yogyakarta, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018.

Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Studi Kasus*, Nusamedia, Bandung, 2018.

Tjilen, Alexander Phuk, *KEBIJAKAN PUBLIK : Konsep, Teori Dan Teknik Analisis Implementasi*, Nusamedia, Bandung, 2019.

Wahab, Solichin Abdul, *ANALISIS KEBIJAKAN : Dari Formulasi ke Penyusunan Mogel-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.

Sumber Jurnal dan Skripsi :

Hayat, S. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SUNGAI RASAU KECAMATAN BUMI MAKMUR KABUPATEN

TANAH LAUT. (Diakses pada tanggal 6 desember 2022)

Hertati, D. (2020). Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Berbasis Web Bagi Pemerintahan Desa di Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1). (Diakses pada 20 februari 2023)

Hidayatullah, H., Suriyani, E., & Suryani, L. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2018 DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI LIHAT DARI ASPEK SUMBER DAYA DI DESA AMPAH II KECAMATAN DUSUN TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR. *JAPB*, 3(1), 43-52. (Diakses pada 9 Mei 2013)

Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1). (Diakses pada 20 februari 2023)

ISRA, W. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN MENCEGAH KESENJANGAN SOSIAL (Studi Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah_Mataram). (Diakses pada 1 Desember 2022)

Jamiah, J. (2020). Efektivitas Program Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di

- Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 21(2), 75-94. (Diakses pada 1 Desember 2022)
- Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99). (Diakses pada 26 Januari 2023)
- Pangerapan, S. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA TATELU RONDOR KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA UTARA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 3(2), 96-116. (Diakses tanggal 1 Februari 2023)
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37. (Diakses pada 30 November 2022)
- Rahmadana, Ni'ma. (2021). "Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Towara Pantai Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara." Skripsi, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makasar. (Diakses pada 30 November 2022)
- Wicaksono, T. E. (2020). *Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang* (Doctoral dissertation, STIE PGRI Dewantara). (Diakses pada 30 November 2022)
- Yasin, H., & Wahyuli, S. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1(2), 129-139. (Diakses pada 9 Mei 2023)

Sumber lain :

<https://idm.kemendes.go.id/>

(Diakses pada tanggal 30 Oktober 2022)

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 142/967 tahun 2021 tentang penetapan alokasi dana desa tahun 2022

Undang Undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa